

## Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

Markus Patiung\*, Ernawati

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

\*markuspatiung@uwks.ac.id

### Abstract

*The Human Development Index (HDI) is an important indicator for measuring the success of efforts to improve the quality of human life and serves as one of the indicators of development performance in a region. The objectives are (1) to provide input to the Bojonegoro Regency Government on the extent of achievements in the quality of life of its people and (2) to evaluate human development through efforts to improve the achievement of each indicator, including Life Expectancy, Expected Years of Schooling, Average Years of Schooling and per capita Purchasing Power of the people of Bojonegoro Regency. This research employs a mixed-method approach, combining both qualitative and quantitative research. Successful human development is characterized by providing opportunities for people to enjoy a long and healthy life and lead a productive life. The purchasing power of the community positively influences the increase in Clean and Healthy Living Behavior (PHBS), which in turn positively impacts the increase in Life Expectancy. Improvements in education can raise public awareness of the importance of Clean and Healthy Living Behavior. Thus, PHBS itself can mediate and strengthen purchasing power and average years of schooling, thereby influencing the increase in Life Expectancy. Conclusions (1) The HDI of Bojonegoro Regency from 2020 to 2023 experienced an average increase of 0.54 points. In 2023, the HDI was 71.80, with the achievement of each indicator as follows Life Expectancy was 74.72 Expected Years of Schooling was 12.92 Average Years of Schooling was 7.45 and per capita Purchasing Power was Rp. 10,776,000. (2) The projected HDI for 2024 is 72.53, an increase of 0.73 points, with the HDI indicators being Life Expectancy at 75.01, Expected Years of Schooling at 13.04, Average Years of Schooling at 7.51, and per capita Purchasing Power at Rp. 11,263,000.*

**Keywords:** Measurement; Index; Development; Human

### Abstrak

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan membangun kualitas hidup manusia, dan salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah. Tujuan dari penelitian ini (1) memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seberapa besar capaian dalam kualitas hidup masyarakatnya (2) Evaluasi pembangunan manusia melalui upaya-upaya meningkatkan capaian masing-masing indikator, Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Kemampuan daya beli per kapita masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian penggabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil Pembangunan manusia yang berhasil adalah pembangunan manusia yang memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menikmati umur panjang dan sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Kemampuan daya beli masyarakat berpengaruh positif kepada meningkatnya Pembiasaan Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS), sehingga berpengaruh positif juga pada peningkatan usia harapan hidup. Peningkatan pendidikan mampu menyadarkan masyarakat untuk

mau melaksanakan Pembiasaan Hidup Bersih Dan Sehat. Sehingga PHBS sendiri mampu memediasi serta memperkuat kemampuan daya beli dan rata-rata lama sekolah, sehingga berpengaruh pada peningkatan UHH. Kesimpulan (1) IPM Kabupaten Bojonegoro tahun 2020-2023 mengalami kenaikan rata-rata 0,54 poin. Tahun 2023 IPM 71,80 dengan capaian masing-masing indikator adalah Usia Harapan Hidup adalah 74,72 Harapan Lama Sekolah adalah 12,92 Rata-rata Lama Sekolah adalah 7,45 dan Kemampuan Daya Beli per Kapita masyarakat adalah Rp. 10.776.000,- (2) Hasil proyeksi IPM tahun 2024 adalah 72,53 naik 0,73 poin dan indikator IPM adalah Usia Harapan Hidup adalah 75,01, Harapan Lama Sekolah adalah 13,04, Rata-rata Lama Sekolah adalah 7,51 dan Kemampuan Daya Beli per kapita masyarakat adalah Rp. 11.263.000.

## **Kata Kunci: Pengukuran; Indeks; Pembangunan; Manusia**

### **Pendahuluan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, selain itu juga sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah (Maulana, Pitoyo & Alfana, 2022). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh (UNDP, 1990) dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR/*Human Development Report*. Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPPBB) pada tahun 1990 dan diterbitkan secara berkala dalam Laporan Pembangunan Manusia (LPM) setiap tahun.

IPM digunakan untuk klasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Luther et al., 2019). Kemudian diadopsi untuk mengukur indeks pembangunan di daerah. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena semua pemerintah daerah perlu mengetahui keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakatnya yang harus diukur setiap tahun, untuk mengetahui keberlanjutan pembangunan di setiap wilayah (Suhendra et al., 2020). IPM memiliki 3 dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungan (1) Kesehatan, yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran, (2) Pendidikan, yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, (3) Standar hidup layak, yang dihitung dari produk nasional bruto per kapita. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memerlukan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia adalah Kabupaten Bojonegoro (Suhendra et al., 2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan Indeks Komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Standar Hidup Layak yang tertuang dalam Paritas Daya Beli/ *Purchasing Power Parity* (Alviani, Kurniati & Badruzzaman, 2021). Sejak otonomi daerah, maka setiap daerah diharapkan untuk mengetahui ukuran IPM daerahnya sendiri baik untuk keperluan perencanaan maupun untuk evaluasi khususnya dalam mengetahui perkembangan dan sebaran hasil-hasil pembangunan bidang manusia (Sikana & Wijayanto, 2021).

Tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro digambarkan oleh IPM, selalu mengalami kenaikan meskipun sampai tahun 2023 posisi masih di bawah Provinsi Jawa Timur yaitu pada angka 74,65 di tahun 2023 (Muqorrobin Soejoto, 2017). Pengukuran keberhasilan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro perlu diukur dengan angka IPM. Angka ini dapat menunjukkan sejauh mana tingkat pencapaian pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan

penduduknya (Faelassuffa & Yuliani, 2022). Untuk mengukur hal tersebut maka penelitian ini akan membahas permasalahan berikut adalah seberapa besar pencapaian komponen IPM Kabupaten Bojonegoro?, Bagaimana masing-masing indikator Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Kemampuan Daya Beli per Kapita masyarakat (Soekapdjo & Oktavia, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis berapa IPM Kabupaten Bojonegoro tahun 2024, Menganalisis capaian masing-masing indikator adalah Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Kemampuan Daya Beli per Kapita masyarakat (PPP) (Mohammad Fauzan et al., 2020). Luaran Kegiatan Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro meliputi Angka Harapan Hidup, jumlah rata-rata tahun (umur) yang diharapkan oleh seseorang yang baru lahir untuk dijalani sampai meninggal kelak Febriyani & Anis (2021), Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah yakni mengukur pengetahuan dan ketrampilan Kahar (2018), Paritas daya beli atau pengeluaran per kapita merupakan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli (Kirana & Ayuningsasi, 2022).

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penggabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahan tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah metode penelitian menggunakan angka dan statistic dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif pendekatan dalam usulan penelitian, proses, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Adapun data sekunder yang digunakan adalah dalam penelitian ini diantaranya data kependudukan, pendidikan dan ekonomi. Sedangkan data primer adalah data yang langsung diambil dari masyarakat. Teknik Penentuan Informan, Dalam penelitian ini sample diambil berdasarkan probability sampling dengan teknik simple random sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah sebanyak 1.363.058 jiwa dan tersebar di 28 kecamatan. Sedangkan penentuan jumlah sample ditentukan dengan rumus Solvin. Dengan derajat kesalahan 5%, maka jumlah sample yang diambil sebanyak 400 jiwa. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini meliputi panduan wawancara, sedang dalam penelitian kuantitatif instrument penelitian adalah angket atau kuesioner. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data, Langkah pengumpulan data akan diawali dari menentukan informasi yang akan dikumpulkan, menetapkan jangka waktu penelitian, menentukan metode pengumpulan data, melakukan pengumpulan data dan akhirnya dengan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan IPM berdasarkan rata-rata geometric indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran. Klasifikasi IPM Berdasarkan klasifikasi IPM menurut *United Nations Development Programme (UNDP)* untuk melihat capaian IPM suatu wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori:

- $IPM < 60$  : IPM Rendah
- $60 \leq IPM < 70$  : IPM Sedang
- $70 \leq IPM < 80$  : IPM Tinggi
- $IPM \geq 80$  : IPM Sangat Tinggi

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro

Capaian indeks pembangunan manusia dan komponennya di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan. Adapun capaian indeks pembangunan manusia dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Komponennya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023

IPM dan Komponennya	IPM	UHH	HLS	RLS	PPP (Dalam Ribuan)
2020	70,18	74,14	12,39	7,33	10.121
2021	70,70	74,23	12,68	7,38	10.221
2022	71,15	74,48	12,84	7,43	10,323
2023	71,80	74,72	12,92	7,45	10.776
2024*	72,53	75,01	13,04	7,51	11.263

Update Proyeksi 2024

Dari tabel 1 diketahui IPM Kabupaten Bojonegoro ada peningkatan sebesar 0,65 poin dari tahun 2022 dan proyeksi tahun 2024 naik sebesar 0,73 poin hal ini diprediksi dengan peningkatan semua sektor pendukung IPM, baik ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang sudah semakin baik dan bangkit dari kondisi Pandemi covid-19 (Prameswari, Muljaningsih & Asmara, 2021). Untuk UHH ada peningkatan sebesar 0,24 poin dan diproyeksikan tahun 2024 mengalami kenaikan 0,29 poin. HLS tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin dan tahun 2024 di proyeksikan naik 0,12 poin. RLS Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 0,02 poin dan di proyeksikan tahun 2024 naik 0,06. Untuk PPP atau pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp. 453.000,- dan di proyeksikan tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp. 487.000,-. Kondisi IPM Kabupaten Bojonegoro telah melampaui target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 yaitu pada tahun 2023 target IPM adalah 70,50-71,00 dan pada tahun 2024 target IPM adalah 71,22-71,85.

### 2. IPM Kabupaten Bojonegoro

Pada penelitian ini dilakukan proyeksi IPM Kabupaten Bojonegoro tahun 2024, juga dilakukan proyeksi IPM tahun 2024 di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dilakukan proyeksi IPM Kecamatan adalah untuk lebih mengetahui pemerataan pembangunan yang sudah dirasakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 2. Hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

No	Kecamatan	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	PPP (Ribu Rp/Tahun)	IPM
1	Margomulyo	70,01	12,64	7,05	10.532	69,88
2	Ngraho	69,43	12,78	7,12	10.637	70,03
3	Tambakrejo	69,77	12,58	7,01	10.672	69,90
4	Ngambon	69,77	12,54	7,01	10.470	69,79
5	Sekar	70,04	12,76	7,11	10.559	70,50
6	Bubulan	70,10	12,86	7,14	10.867	70,98
7	Gondang	70,94	12,65	7,17	10.870	71,42
8	Temayang	74,09	12,80	7,38	11.090	72,14

9	Sugihwaras	73,97	12,71	7,51	11.099	72,16
10	Kedungadem	70,18	12,90	7,98	11.089	71,85
11	Kepohbaru	70,49	12,83	7,97	10.981	71,93
12	Baureno	71,04	12,98	8,32	11.255	72,57
13	Kanor	70,81	12,65	8,03	10.970	71,88
14	Sumberejo	75,40	13,01	8,35	11.265	72,58
15	Balen	72,56	12,79	8,05	11.045	71,90
16	Sukosewu	75,83	12,71	7,67	10.982	71,91
17	Kapas	76,79	13,00	9,15	11.317	72,60
18	Bojonegoro	76,82	13,51	11,78	11.394	74,55
>19	Trucuk	72,88	12,80	8,09	10.999	71,90
20	Dander	71,58	13,00	8,04	11.000	72,50
21	Ngasem	70,00	12,65	7,05	10.552	69,95
22	Gayam	72,04	12,85	7,22	11.088	71,89
23	Kalitidu	70,80	12,86	8,00	10.962	71,83
24	Malo	70,63	12,61	7,18	10.869	71,36
25	Purwosari	71,00	12,89	7,21	10.877	71,53
26	Padangan	72,06	13,00	8,21	11.019	72,51
27	Kasiman	71,21	12,91	7,51	10.934	71,90
28	Kedewan	70,15	12,71	7,13	10.669	70,32

Sumber: Hasil Proyeksi

Dari tabel 2 disajikan hasil proyeksi IPM Kecamatan tahun 2024, IPM dibangun dari tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan sehat yang diwakili dengan Usia Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan di wakili oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh Pengeluaran perkapita penduduk yang disesuaikan (PPP) (Putri, Anggeraini & Desmawan 2023). Dari ketiga dimensi tersebut dapat diketahui gambaran pembangunan manusia di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

### 3. Usia Harapan Hidup

UHH banyak dipengaruhi oleh kondisi derajat kesehatan yang baik yaitu dari perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, faktor lingkungan dan keturunan. Perilaku kesehatan termasuk melakukan PHBS sangat mempengaruhi UHH karena dengan melakukan pola hidup sesuai PHBS maka akan mengurangi keluhan kesehatan penduduk (Putri et al., 2023).

Tabel 3. Indikator Terkait Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)  
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023

No	Indikator	Tahun 2023 (%)
1	Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	100
2	Pemberian ASI Eksklusif	83,0
3	Menimbang Bayi dan Balita	90,9
4	Cuci Tangan	98,9
5	Tersedianya Air Bersih	99,4
6	Tersedianya Jamban Sehat	99,8
7	Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	90,2
8	Makan Sayur dan Buah	97,4
9	Aktifitas Fisik Setiap Hari (Olahraga)	97,0
10	Tidak Merokok Di Dalam Rumah	57,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024

Penerapan PHBS di Kabupaten Bojonegoro sampai tahun 2023 sebagian besar sudah lebih baik dan mendekati 100 persen. Untuk pemberian ASI eksklusif menurut standar kesehatan sudah lebih dari 80 persen, Pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan menurunkan resiko angka kematian bayi dan meningkatkan bonding antara bayi dan ibu. Masih terdapat 17 persen baduta (bawah dua tahun) yang belum mendapat ASI eksklusif pada tahun 2023 (Cahyanti, Muchtolifah & Sishadiyati, 2021). Indikator terakhir dalam mengukur perilaku hidup sehat adalah pola konsumsi rokok tidak di dalam rumah. Pada tahun 2023 persentase penduduk Kabupaten Bojonegoro tidak merokok di dalam rumah adalah 57,2 persen. Hal ini masih perlu banyak perbaikan mengingat kesehatan keluarga adalah tanggung jawab Bersama anggota keluarga. Kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan bayi lahir hidup, ibu melahirkan, imunisasi dan lainnya. Di Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 kematian bayi mengalami penurunan dari tahun 2022 ada 77 kasus menjadi 70 kasus di tahun 2023, dengan kejadian merata di setiap Puskesmas, paling banyak terjadi di Puskesmas Kedungadem ada 6 kasus, Kepohbaru dan Baureno masing- masing 5 kasus. Untuk kematian ibu juga mengalami peningkatan menjadi 14 kasus dengan penjelasan bahwa 9 kasus murni pasien dan penduduk Kabupaten Bojonegoro sedangkan 5 kasus dari pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang mempunyai KTP Kabupaten Bojonegoro.

Pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan ibu nifas sangat penting untuk menekan angka kematian bayi, faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan adalah layanan air bersih. Layanan air bersih ini sangat di pengaruhi oleh pengeluaran perkapita (PPP), karena kondisi sekarang masyarakat lebih banyak mengkonsumsi air kemasan dan sumber air leding juga memerlukan biaya sedangkan sumber air alam apabila terjadi kemarau sering mengalami kekeringan (Rimawan & Aryani, 2019).

#### 4. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

HLS dan RLS sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kesempatan pendidikan yang dirasakan penduduk di setiap kecamatan yaitu tersedianya fasilitas fisik sekolah, keterjangkauan akses dari jarak rumah ke sekolah dan akses sekolah dari biaya pendidikan, serta pengaruh budaya yang ada di masyarakat (SBM, N., 2014). Secara ketersediaan fisik sekolah, di Kabupaten Bojonegoro sudah tersedia sekolah mulai dari PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat di setiap kecamatan. Untuk SMA/ SMK/ MA ada kecamatan yang belum ada fasilitas ini yaitu Kecamatan Kedewan. Apabila di lihat secara jumlah SMA/ sederajat di Kabupaten Bojonegoro sudah mencukupi untuk kebutuhan sekolah di wilayah Kabupaten Bojonegoro, namun lokasi sekolah SMA/ sederajat ini paling banyak terletak di kecamatan kota. Kondisi ini bisa mengakibatkan untuk penduduk yang terletak di lokasi pelosok Bojonegoro kesulitan menjangkau secara jarak untuk melanjutkan sekolah SMA/ sederajat, mengingat secara geografi luas wilayah Kabupaten Bojonegoro lebih luas dibandingkan luas wilayah Kabupaten sekitarnya.

Tabel 4. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	∑ Kecamatan	∑ Desa	∑ Kelurahan
Lamongan	1.812,80	27	462	12
Nganjuk	1.224,33	20	264	28
Madiun	1.010,86	15	198	8
Ngawi	1.394,74	19	213	4
Bojonegoro	2.307,06	28	419	11
Tuban	1.839,94	20	311	17

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten paling luas wilayahnya dari Kabupaten sekitarnya dengan pembagian pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan cukup besar. Kondisi ini memungkinkan jarak wilayah satu ke lainnya cukup jauh. Kecamatan Kedewan salah satu kecamatan pelosok di Kabupaten Bojonegoro dan beberapa kecamatan lainnya. Motivasi melanjutkan sekolah sampai tingkat SMA/ sederajat sangat diperlukan mengingat di beberapa kecamatan berjarak cukup jauh dari lokasi SMA/ sederajat. Dukungan keluarga sangat berperan bagi motivasi anak-anak untuk mau melanjutkan sekolah SMA/ sederajat. Tidak hanya dukungan alat transportasi tetapi juga dukungan moril dan semangat untuk pentingnya melanjutkan sekolah. Pendataan penduduk usia sekolah SMA sampai ke desa sangat penting untuk dilakukan untuk selanjutnya diberikan kesempatan melanjutkan di PKBM Kecamatan sehingga bisa menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa dan akan menaikkan angka Rata-Rata Lama Sekolah. Setiap tahun pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga selalu memperhatikan fasilitas fisik gedung sekolah dan selalu ada perbaikan. Untuk perguruan tinggi sudah banyak yaitu ada 14 unit satuan pendidikan, tetapi 7 perguruan tinggi berada di Kecamatan kota yaitu kecamatan Bojonegoro.

Penambahan fasilitas perguruan tinggi untuk memberi kesempatan penduduk Bojonegoro berkuliah di Kabupaten Bojonegoro sendiri sangat mempengaruhi kenaikan HLS dan RLS maka perlu dipertimbangkan untuk membuka perguruan tinggi negeri yang bisa menampung masyarakat Bojonegoro untuk berkuliah tidak keluar kota. Untuk meningkatkan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bojonegoro juga menyelenggarakan beberapa program beasiswa bagi penduduk Kabupaten Bojonegoro. Beasiswa yang diberikan dicairkan setiap semester, Tahun 2023 di Kabupaten Bojonegoro program Beasiswa dikembangkan lagi menjadi Beasiswa 10 sarjana per desa, dan ada *Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL)* untuk penggiat Desa. Tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro telah mengusahakan *Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL)* untuk S2 sebanyak 250 orang dengan beasiswa per orang adalah Rp. 22.000.000,00. Mahasiswa menempuh study di Universitas Bojonegoro sebanyak 110 mahasiswa dan Universitas Negeri Surakarta (UNS) sebanyak 140 mahasiswa. Total dana yang diberikan untuk beasiswa RPL adalah Rp. 5.500.000.000,00. Program ini diharapkan mampu mengurangi sedikit demi sedikit *gap* penduduk yang berusia diatas 25 tahun dan mempunyai pendidikan yang tinggi. Hal ini bisa mempengaruhi pencapaian nilai rata-rata lama sekolah (Yektiningsih, 2018).

## **5. Pengeluaran Per Kapita Penduduk disesuaikan (PPP)**

Pengeluaran per kapita penduduk yang disesuaikan menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Indikator ini mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Kemiskinan dan ketimpangan sangat mempengaruhi kemampuan daya beli penduduk di kecamatan. Kecamatan dengan presentase penduduk miskin yang lebih banyak otomatis akan mengalami kemampuan daya beli tidak setinggi kecamatan lainnya (Suhendra et al., 2020). Berdasarkan Data Mandiri Masyarakat Miskin daerah (DAMISDA) Kabupaten Bojonegoro Kecamatan dengan presentase penduduk miskin yang lebih banyak di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kecamatan Ngambon 32,98 persen, Margomulyo 25,17 persen, Tambakrejo 24,14 persen, Ngasem 22,83 persen, Ngraho 21,45 persen, Sekar 21,08 persen, dengan presentase penduduk miskin diatas 21 persen. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki PPP yang cukup rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya sehingga akan beda kesejahteraan dengan kecamatan lainnya. Akibatnya adalah kesempatan pendidikan juga bisa lebih rendah dari kecamatan lainnya dan secara tidak langsung pemahaman mengenai PHBS juga kurang. Hal ini juga berpengaruh kepada UHH (Raharti, Sarnowo & Aprillia, 2020).

## 6. IPM dan Keterkaitan Antar Dimensinya

Setelah dilakukan proyeksi IPM kecamatan di Kabupaten Bojonegoro terlihat Kecamatan dengan IPM cukup tinggi tahun 2024 adalah Kecamatan Baureno 72,53, Sumberrejo 72,58, Kapas 72,60 dan Bojonegoro 74,55. Banyak faktor yang mempengaruhi kecamatan-kecamatan ini memiliki IPM yang cukup tinggi. Pertama derajat kesehatan bisa dikatakan tinggi karena pelaksanaan PHBS yang baik, pelayanan kesehatan baik keterjangkauan dengan layanan kesehatan dekat, faktor lingkungan yang mempengaruhi termasuk layanan air bersih mencukupi. Untuk keterjangkauan pendidikan, masyarakat di kecamatan-kecamatan ini cukup banyak pendatang dengan pemahaman dan budaya yang lebih baik mengenai pendidikan, fasilitas pendidikan juga cukup memadai sampai tingkat perguruan tinggi. Kemampuan daya beli masyarakat kecamatan kota yang kebanyakan memiliki sumber penghasilan yang pasti karena memiliki profesi tertentu sehingga PPP cukup tinggi (Wahyu Setiawan & Ariani, 2022).

Indikator-indikator IPM saling terkait, keterkaitan antara Usia Harapan Hidup (UHH) dengan Indikator kemampuan daya beli (pendapatan masyarakat) akan berpengaruh positif terhadap UHH karena meningkatnya daya beli akan membuat masyarakat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk memperpanjang hidupnya menghindari kesakitan (Yuniarti, Wianti & Nurgaheni, 2020). Rata-rata lama sekolah, tidak selalu berpengaruh langsung kepada UHH tetapi rata-rata lama sekolah akan meningkatkan pelaksanaan PHBS yang beimbab kepada meningkatnya UHH. Semakin tinggi pendidikan maka pola pikir masyarakat akan semakin baik karena mendapat ilmu lebih banyak terutama untuk melaksanakan PHBS terlepas dari budaya masyarakat setempat (Syaifullah & Malik, 2017). Dengan semakin meningkatnya UHH maka penduduk lansia akan bertambah banyak dan menjadi indikator semakin baiknya pelayanan kesehatan sehingga bisa meningkatkan harapan hidup.

Disamping pentingnya pendidikan untuk meningkatkan PHBS, ketersediaan tenaga kesehatan Dokter, Perawat, Bidan, Ahli Gizi dan lainnya akan meningkatkan pelaksanaan PHBS di masyarakat (Hasibuan, Rujiman & Sukardi, 2020). Kemampuan daya beli juga berpengaruh kepada meningkat pula perilaku hidup bersih dan sehat, apabila masyarakat memiliki pendapatan yang cenderung meningkat akan lebih memperhatikan perilaku mereka agar lebih baik dan sehat, seperti bersalin dibantu tenaga medis, dapat memperoleh air bersih, mencuci tangan dengan sabun, memiliki jamban yang sehat, makan sayur serta buah setiap hari, dan lain-lain (Sari & Supadmi, 2016).

### Kesimpulan

Pembangunan manusia yang berhasil adalah pembangunan manusia yang memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menikmati umur panjang dan sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Kemampuan daya beli masyarakat berpengaruh positif kepada meningkatnya PHBS, sehingga berpengaruh positif juga pada peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Peningkatan pendidikan mampu menyadarkan masyarakat untuk mau melaksanakan Pembiasaan Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Sehingga PHBS sendiri mampu memediasi serta memperkuat kemampuan daya beli dan rata-rata lama sekolah, sehingga berpengaruh pada peningkatan UHH. IPM Kabupaten Bojonegoro selama empat tahun terakhir yaitu 2020-2023 mengalami kenaikan rata-rata 0,54 poin. Kabupaten Bojonegoro masuk kategori IPM tinggi sejak tahun 2020. Tahun 2023 IPM Kabupaten Bojonegoro adalah 71,80 dengan capaian masing-masing indikator adalah Usia Harapan Hidup (UHH) adalah 74,72 Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah 12,92 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah 7,45 dan Kemampuan Daya Beli per Kapita masyarakat (PPP) adalah Rp. 10.776.000. Pada tahun 2024 dilakukan proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

Bojonegoro dengan hasil proyeksi 72,53 naik 0,73 poin dan indikator IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH) adalah 75,01, Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah 13,04, Rata rata Lama Sekolah (RLS) adalah 7,51 dan Kemampuan Daya Beli per kapita masyarakat (PPP) adalah Rp. 11.263.000,-.

### Daftar Pustaka

- Alviani, L. O. (2021). Penggunaan Regresi Data Panel pada Analisis Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Matematika*, 1(2), 99-108.
- Cahyanti, N. D., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Faktor-faktor Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 93-101.
- Fauzan, M., Nusantara, A., Nawatmi, S., & Santosa, A. B. (2020). Indeks Pembangunan Manusia Dan Pendidikan Di Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 27(1).
- Faelassuffa, A., & Yuliani, E. (2021). Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Kajian Ruang*.
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(4), 9-16.
- Hasibuan, L. S., & Rujiman, S. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2), 139-141.
- Kahar, A. M. (2018). Analisis Angka Harapan Lama Sekolah Di Indonesia Timur Menggunakan Weighted Least Squares Regression. *Jurnal Matematika Mantik*, 4(1), 32-41.
- Kirana, D. N., & Ayuningsasi, A. A. K. (2022). Pengaruh Remitansi, Foreign Direct Investment, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 6, 35.
- Luther, I., Sirangi Si, Zamruddin Hasid. (2019). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 159-169.
- Maulana, R., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Media Komunikasi Geografi*, 23(1), 12-24.
- Muqorrobin, M. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jupe)*, 5(3).
- Prameswari, A., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(2), 168-179.
- Putri, N. A. A., Anggeraini, F. & Desmawan, D. (2023). Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat (2013-2022). *Katadata.Co.Id* 1(1):64–70.
- Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprillia, L. N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 6(1), 36-53.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287-295.
- Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2409-2438.

- Sikana, A. M., & Wijayanto, A. W. (2021). Analisis Perbandingan Pengelompokan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019 dengan Metode Partitioning dan Hierarchical Clustering. *J. Ilmu Komput*, 14(2), 66-78.
- Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 5(2), 94-102.
- Suhendra, I., Istikomah, N., Ginanjar, R. A. F., & Anwar, C. J. (2020). Human Capital, Income Inequality And Economic Variables: A Panel Data Estimation From A Region in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 571-579.
- Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4 (Studi pada 4 negara ASEAN). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 107-119.
- Setiawan, A. W., & Ariani, M. N. (2022). Determinasi Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(01), 1-9.
- Utari, S. S., Rachmina, D., & Tinaprilla, N. (2023). Efisiensi Teknis Usaha Tani Bawang Merah di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28(1), 114-122.
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2).
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169-176.